

# Gender Equality During Tri Rismaharini Leadership as Mayor of Surabaya

## [Kesetaraan Gender Dalam Kepemimpinan Tri Rismaharini Sebagai Wali Kota Surabaya]

Arinda Reihansyah Achsanti<sup>1)</sup>, Hendra Sukmana<sup>\*,2)</sup>

<sup>1)</sup> Program Studi Administrasi Publik, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Indonesia

<sup>2)</sup> Program Studi Administrasi Publik, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Indonesia

\*Email : [arindarach@gmail.com](mailto:arindarach@gmail.com), [hendra.sukmana@umsida.ac.id](mailto:hendra.sukmana@umsida.ac.id)

**Abstract.** *This research aims to analyze, describe, and examine the implementation of gender equality in the leadership of Tri Rismaharini as the Mayor of Surabaya. The research employs a literature study method with a qualitative approach and descriptive analysis to address the research problem. The process begins with data collection and problem identification, followed by data screening to select relevant sources, and then analyzing the filtered articles to gather supporting theories. The findings, aligned with Suryani's framework, reveal that Tri Rismaharini's leadership successfully promoted gender equality through four key indicators. In terms of access, her administration implemented programs such as Pahlawan Ekonomi and Rumah Bahasa, which expanded opportunities for women to acquire skills, education, and economic independence while strengthening gender-responsive urban infrastructure. For participation, women were actively encouraged to engage in development and bureaucracy, with Risma herself serving as a role model for female leadership in a space previously dominated by men. Regarding control, women's authority over their social, economic, and future lives was reinforced through human-centered policies, such as the closure of the Dolly prostitution area accompanied by economic empowerment programs for affected women. As for benefits, her leadership generated wide-ranging impacts, including poverty reduction, the growth of women-led SMEs, the creation of safe and healthy public spaces, and international recognition of Surabaya as an inclusive and gender-equitable city. Overall, Tri Rismaharini's leadership in Surabaya exemplifies the successful implementation of gender equality in governance, demonstrating that gender equality can be realized and produce tangible positive outcomes.*

**Keywords -** Gender equality; Leadership; Women's empowerment

**Abstrak.** *Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis, mendeskripsikan, dan mengetahui tentang adanya kesetaraan gender dalam kepemimpinan Tri Rismaharini sebagai Wali Kota Surabaya. Penelitian ini menggunakan metode studi literatur dengan pendekatan kualitatif dan analisis deskriptif untuk menjawab masalah penelitian. Penelitian ini dimulai dengan pengumpulan data dan identifikasi masalah, selanjutnya, penyaringan data dilakukan untuk digunakan dalam penelitian, kemudian menganalisis artikel yang sudah dilakukan penyaringan data sebelumnya untuk mengumpulkan teori yang mendukung penelitian. Hasil penelitian yang disesuaikan dengan teori Suryani menunjukkan bahwa kepemimpinan Tri Rismaharini mampu mendorong kesetaraan gender melalui empat indikator utama. Pada indikator akses, pada masa kepemimpinan Tri Rismaharini diwujudkan melalui program seperti Pahlawan Ekonomi dan Rumah Bahasa yang membuka peluang luas bagi perempuan untuk memperoleh keterampilan, pendidikan, serta kemandirian ekonomi, sekaligus memperkuat infrastruktur kota yang ramah gender. Indikator partisipasi, perempuan juga didorong secara aktif dalam pembangunan dan birokrasi, di mana Risma sendiri menjadi teladan kepemimpinan perempuan di ruang publik yang sebelumnya didominasi laki-laki. Kemudian indikator kontrol, yaitu dengan adanya kontrol atas kehidupan sosial, ekonomi, dan masa depan perempuan diperkuat melalui kebijakan humanis, misalnya dalam penutupan lokalisasi Dolly yang diiringi dengan pemberdayaan ekonomi bagi perempuan terdampak. Serta indikator manfaat, terdapat manfaat dari kepemimpinan Risma yang dapat dirasakan secara luas, mulai dari penurunan angka kemiskinan, pertumbuhan UMKM perempuan, hadirnya ruang publik yang sehat, hingga penghargaan internasional yang menegaskan keberhasilan Surabaya sebagai kota inklusif dan berkeadilan gender. Secara keseluruhan, kepemimpinan Tri Rismaharini di Surabaya merupakan contoh sukses dari implementasi kesetaraan gender dalam tata kelola pemerintahan, keberhasilan Risma membuktikan bahwa kesetaraan gender dapat diwujudkan dan menghasilkan dampak positif yang nyata.*

**Kata Kunci -** Kesetaraan gender; Kepemimpinan; Pemberdayaan perempuan

## I. PENDAHULUAN

Seiring perkembangan zaman, kesetaraan gender telah mulai berkembang. Gender bukan hanya tentang perbedaan jenis kelamin antara pria dan wanita, tetapi juga tentang bagaimana pria dan wanita tersebut berbeda satu sama lain dalam hal identitas sosial atau budaya mereka dalam masyarakat (WHO, 2013). Menurut Perserikatan Bangsa-Bangsa (1948), kesetaraan gender adalah keyakinan bahwa setiap individu harus bertindak dengan tenang dan tidak dihakimi berdasarkan identitas gender mereka. Selama ini, argumen tentang kesetaraan gender juga telah memengaruhi dunia kerja dan politik. Tidak jelas apakah setiap orang dapat berpartisipasi dan mendapatkan manfaat yang sama di lingkungan sekitar. Tak heran jika ada beberapa golongan atau kelompok, seperti halnya wanita yang terpinggirkan. Adapun makna dari kesetaraan gender menurut Lampiran Inpres No.9 Tahun 2000 adalah suatu proses untuk menjadi adil terhadap laki-laki dan perempuan. (Suryani, 2010) menjelaskan bahwa kesetaraan gender adalah laki-laki dan perempuan dapat memperoleh akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat yang sama dalam mewujudkan pembangunan. Penilaian dan penghargaan yang sama diberikan oleh masyarakat terhadap persamaan dan perbedaan perempuan dan laki-laki dalam berbagai peran yang mereka jalankan.

Pada dasarnya, tidak akan ada masalah dengan perbedaan gender selama adanya perlakuan yang adil antara laki-laki dan perempuan. Perlakuan yang tidak adil ini akan menyebabkan kekerasan, subordinasi, dan beban ganda bagi perempuan dalam menjalani kehidupan sosial. Faktanya kaum perempuan telah mengalami ketimpangan dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat, termasuk di bidang kerja seperti ekonomi, sosial, politik, dan pendidikan. Pada beberapa kelompok masyarakat, ada sistem patriarki yang memungkinkan hanya kaum laki-laki untuk menjadi pemimpin. Kondisi ini jelas merupakan diskriminasi yang merugikan wanita. Segala bentuk perlakuan yang berdampak pada perbedaan, pengucilan, atau pembatasan yang disebabkan oleh jenis kelamin dan yang tidak mengakui kebebasan perempuan disebut diskriminasi. Organisasi Internasional Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) berusaha menghapus semua jenis diskriminasi terhadap perempuan dengan mengeluarkan instrument yang dikenal sebagai Convention on Elimination of Forms of Discrimination Against Women (CEDAW). Melalui pelaksanaan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1984, Indonesia menjadi salah satu negara yang mendukung konvensi tersebut. Dengan menyetujui Konvensi Internasional CEDAW, hal tersebut diharapkan dapat menghapus diskriminasi terhadap perempuan, memberikan perlindungan, dan menyuarkan hak mereka.

Para pejuang feminisme liberal pada abad ke-19 memulai adanya kepemimpinan perempuan. Hal ini disebabkan karena meningkatnya kesadaran bahwa kesetaraan gender diperlukan di suatu negara. Namun, karena budaya maskulinitas yang lebih kuat, perjuangan tersebut dianggap lemah. Hal tersebut mendorong perempuan berubah menjadi maskulin karena peraturan di lapangan kerja yang cenderung maskulin. Dalam manajemen sumber daya manusia, kepemimpinan adalah komponen penting. Kepemimpinan adalah kunci untuk mencapai tujuan organisasi sesuai dengan visi dan misi organisasi. Kepemimpinan adalah seni untuk mempengaruhi bawahan dan membuat kelompok dapat bekerja sama untuk mencapai tujuan. Kepemimpinan juga memengaruhi budaya dan sistem pengelolaan organisasi. Ada dua jenis kepemimpinan perempuan yaitu feminisme-maskulin dan transformasional-transaksional. Mereka muncul ketika gender dan karakteristik pekerjaan dikaitkan dengan gaya kepemimpinan.

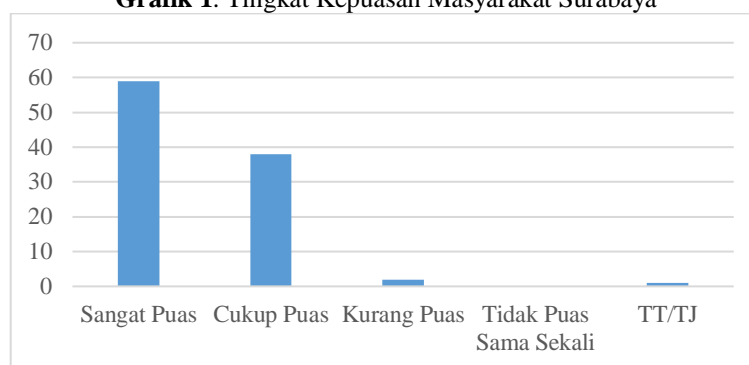
Kepemimpinan tidak terbatas pada bakat, pengalaman, gender, atau keturunan saja; melainkan lebih kepada kemampuan profesional untuk menyelesaikan semua tugas dan tanggung jawab. Hal ini menunjukkan bahwa gender tidak lagi membedakan laki-laki dan perempuan dalam posisi pemimpin, melainkan lebih fokus pada kemampuan dan profesionalitas. Dalam sebuah organisasi, kepemimpinan perempuan mengutamakan kebersamaan dan lebih demokratis dengan melibatkan seluruh anggota organisasi dalam penyusunan perencanaan dan kegiatan. Akibatnya, kepemimpinan perempuan memiliki keunggulan dalam meningkatkan kinerja organisasi. Perubahan paradigma tentang kesetaraan gender dan hak perempuan untuk menjadi pemimpin harus terjadi secara menyeluruh pada semua lapisan masyarakat, dan ini harus berlangsung selama berabad-abad karena pandangan tentang perempuan telah menjadi konstruksi sosial dan budaya masyarakat. Oleh karena itu, untuk mencapai kesetaraan gender bagi perempuan harus dimulai dengan mengubah paradigma masyarakat, karena menurut Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dijelaskan bahwa "Wanita berhak untuk memilih, dipilih, diangkat dalam pekerjaan, jabatan, dan profesi, serta memperoleh perlindungan khusus dalam pekerjaan atau profesinya terhadap hal-hal mengancam keselamatan dan kesehatannya, selanjutnya berkenaan dengan fungsi reproduksinya, maka Wanita dijamin dan dilindungi oleh Hukum".

Salah satu wanita paling menonjol dalam praktik kepemimpinan politik Indonesia adalah Tri Rismaharini, atau yang lebih dikenal sebagai Risma. Risma mencontohkan kekuatan, kejujuran, dan keberanian yang dapat dibawa wanita ke peran kepemimpinan. Surabaya telah mencapai kemajuan luar biasa sejak Walikota Tri Rismaharini menjabat. Kota Surabaya terus dipacu untuk berkembang dengan melaksanakan berbagai program dan inovasi agar mampu bersaing dengan kota-kota besar lainnya di Indonesia. Pertumbuhan ini mendorong beberapa pertanyaan mendasar terkait kontribusi Tri Rismaharini terhadap pembangunan Surabaya dan manfaat jangka panjang dari karyanya. Beberapa faktor menjadikan Ibu Risma sebagai subjek yang relevan untuk dikaji. Latar belakangnya yang

kuat dalam birokrasi memberikan perspektif unik dalam implementasi kebijakan. Sebelum menjabat sebagai wali kota, beliau telah mengawali kariernya sebagai birokrat di Pemerintah Kota Surabaya, sehingga memiliki pemahaman mendalam mengenai struktur pemerintahan daerah serta tantangan birokrasi, yang memungkinkannya merancang serta menerapkan kebijakan secara efektif dan efisien. Komitmen Risma terhadap inklusivitas dan pemberdayaan masyarakat juga menjadi faktor penting. Program-program inovatif yang beliau luncurkan, seperti revitalisasi taman kota dan perpustakaan keliling, tidak hanya meningkatkan kualitas hidup warga Surabaya tetapi juga mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam pembangunan kota. Pendekatan ini menunjukkan kepeduliannya terhadap kesejahteraan sosial dan ekonomi di berbagai lapisan masyarakat, terutama kelompok-kelompok yang terpinggirkan.

Berkat pencapaian yang luar biasa selama menjabat sebagai Wali Kota Surabaya, Tri Rismaharini menjadi subjek kajian yang sangat relevan dalam konteks kepemimpinan perempuan. Studi mengenai beliau tidak hanya memberikan wawasan mengenai gaya kepemimpinan dan kebijakan yang efektif tetapi juga menjadi inspirasi bagi generasi pemimpin perempuan di Indonesia di masa depan. Tri Rismaharini menjabat sebagai Wali Kota Surabaya selama dua periode yaitu dari tahun 2010-2015 dan 2016-2020. Pada akhir masa jabatannya sebagai wali kota, Saiful Mujani Research and Consultancy (SMRC) melakukan survei kepada warga Surabaya dengan menggunakan interval kepercayaan 95% dan margin kesalahan 3,5%, survei dilakukan terhadap 820 partisipan menggunakan fase sampel acak antara 11 November 2020 dan 18 November 2020.

**Grafik 1.** Tingkat Kepuasan Masyarakat Surabaya



*Sumber: Survei SMRC, 2020*

Grafik diatas berisi mengenai data tentang survei kepuasan warga Surabaya terhadap kinerja Tri Rismaharini sebagai Wali Kota Surabaya yang sebelumnya telah dilakukan oleh Saiful Mujani Research and Consultancy (SMRC), dimana pada grafik tersebut menunjukkan bahwa sebanyak 97% warga Surabaya menyatakan puas dengan kinerjanya berdasarkan pada lima kategori. Pada kategori sangat puas diperoleh hasil sebanyak 59%, kategori cukup puas sebanyak 38%, kategori kurang puas sebanyak 2%, kategori tidak puas sama sekali sebanyak 0%, dan pada kategori tidak tahu atau tidak menjawab diperoleh hasil sebanyak 1%.

Isu kepemimpinan perempuan terus diperdebatkan oleh masyarakat umum. Pengakuan hak dasar kemanusiaan, termasuk hak perempuan untuk sejajar dengan pria, tampaknya telah meningkat di seluruh dunia. Namun, hal ini bahkan menyebabkan perdebatan dan perdebatan antara pihak yang mendukung atau menentang pemimpin perempuan di negara-negara. Posisi perempuan masih dibandingkan dengan posisi pria dalam hal kepemimpinan. Dianggap "hanya" pantas bagi pria untuk memegang posisi kekuasaan, perempuan dianggap tidak pantas. Stigma bahwa perempuan tidak perlu sekolah tinggi juga sering digunakan untuk membenarkan tindakan "tidak adil" terhadap kaum perempuan. Rendahnya jumlah perempuan yang menduduki posisi kepemimpinan baik di sektor publik maupun swasta merupakan contoh fenomena gender dalam kepemimpinan di Indonesia. Meskipun Indonesia memiliki undang-undang tentang kesetaraan gender, tetapi nyatanya perempuan masih sering kurang dianggap di lingkungan kerja. Banyak perempuan memiliki kemampuan dan pengalaman yang sama dengan pria, tetapi mereka seringkali tidak dianggap serius sebagai calon pemimpin atau diberikan kesempatan yang sama untuk menduduki posisi kepemimpinan. Fenomena ini menunjukkan bahwa masih ada perbedaan gender dalam posisi kepemimpinan di Indonesia, dan perlu ada upaya yang lebih besar untuk mendorong kesetaraan gender di semua sektor.

Salah satu tujuan Tri Rismaharini sebagai Wali Kota Surabaya adalah meningkatkan kesejahteraan warganya. Ia menerapkan gaya kepemimpinan transformatif yang memotivasi perubahan dan pencapaian luar biasa, terutama dalam pelayanan publik dan perencanaan ruang kota. Pendekatan unik Risma sebagai pemimpin perempuan yang demokratis dan peduli membuatnya disayangi oleh masyarakat. Melalui kepemimpinan transformatif, Risma menempati peringkat ketiga wali kota terbaik dunia menurut The World Mayor Foundation pada tahun 2015. Gaya kepemimpinan Tri Rismaharini dicirikan oleh pendekatan yang sangat personal dan langsung dalam menangani masalah kota, di mana ia sering turun ke lapangan untuk memantau kondisi dan berinteraksi langsung dengan warga. Hal ini menjadikan kepemimpinan Risma sebagai praktik terbaik yang patut untuk dipelajari lebih mendalam.

Penelitian pertama dilakukan oleh (Febrina Eka Wahyu Kartika dan Muarifuddin) yang berjudul “Analisis Kesetaraan Gender Dalam Kepemimpinan Organisasi Mahasiswa”. Penelitian ini membahas tentang adanya posisi atau jabatan yang berbeda dalam Organisasi Mahasiswa dikarenakan banyak pemimpin di dominasi oleh laki-laki. Terjadinya ketidakadilan gender dengan kedudukan perempuan yang menjabat sebagai pemimpin masih rendah yaitu 6% dari 53 Organisasi Mahasiswa di Universitas Negeri Padang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan Kesetaraan Gender dalam Kepemimpinan Organisasi Mahasiswa termasuk dalam kategori tinggi. Kepemimpinan telah menciptakan Kesetaraan Gender di organisasi, bahwa mahasiswa laki-laki dan perempuan telah merasakan dan menduduki jabatan sebagai ketua dan wakil di setiap Organisasi Mahasiswa. Terdapat 8 faktor yang mempengaruhi Kesetaraan Gender dalam Kepemimpinan Organisasi Mahasiswa, yaitu nilai-nilai pemimpin, kepercayaan terhadap anggota, komunikasi, minat, pengetahuan, kesamaan tujuan, struktur dan pola organisasi, dan pengaruh teknologi yang memberikan efek/pengaruh paling tinggi dibanding faktor lainnya. Hal ini membuktikan bahwa mahasiswa perempuan mampu menyelesaikan tugas, dan mematahkan stigma Kepemimpinan yang tidak lebih baik dari laki-laki.

Kemudian penelitian kedua dilakukan oleh (Eka Sri Mulyani Siregar dan Yunia Wardi) yang berjudul “Pengaruh Gender dan Gaya Kepemimpinan Terhadap Kinerja Organisasi”. Penelitian ini membahas mengenai gender yang sangat mempengaruhi kinerja organisasi. Terdapat permasalahan mengenai gender dikarenakan posisi perempuan sebagai pemegang karir dan status sebagai ibu dalam sebuah keluarga tidak menutup kemungkinan pengambilan cuti bekerja akan sering terjadi. Banyaknya tanggung jawab yang harus dijalankan oleh perempuan membuat karir nya di suatu organisasi lemah atau dengan kata lain permasalahan tanggung jawab kerja ini akan menjadi argumen dalam mengidentifikasi permasalahan gender. Dimana pada dasarnya perempuan mempunyai gaya kepemimpinan yang sama dengan laki-laki, hanya saja kodrat perempuan sebagai ibu rumah tangga dengan tanggung jawab penuh terhadap kehidupan rumah tangganya yang membuat waktu bekerja mereka lebih sedikit dibanding laki-laki. Selain itu, akibat dari ketidaksetaraan tersebut juga menimbulkan efek terhadap gaya kepemimpinan perempuan terhadap kinerja organisasinya, dimana gaya kepemimpinan perempuan disimpulkan lebih lemah daripada laki-laki.

Selanjutnya, penelitian ketiga dilakukan oleh (Ivana Septia Maharani, et al) yang berjudul “Optimalisasi Peran Kepemimpinan Perempuan Dalam Membangun Kesetaraan Gender”. Penelitian ini membahas mengenai memberikan sosialisasi kepemimpinan perempuan kepada Kelompok Ibu-Ibu PKK di Desa Wonojati agar lebih optimal dan efektif dalam mengimplementasikan kepemimpinan perempuan dalam membangun kesetaraan gender baik dalam lingkungan keluarga maupun masyarakat, kemudian penelitian ini menghasilkan tiga capaian diantaranya mitra sudah memiliki pengetahuan dan wawasan memiliki wawasan tentang konsep dasar kepemimpinan perempuan dan kesetaraan gender, yang kedua mitra sudah memahami bahwa perempuan dan laki-laki mempunyai hak yang sama. Dan yang paling penting, dalam pengabdian ini mitra dapat mengimplementasikan konsep kesetaraan gender di lingkungan keluarga dan masyarakat. Proses pengabdian ini berjalan sesuai dengan rencana dosen pengabdian. Tidak ada penghalang dan hambatan yang berarti. Seluruh kegiatan terlaksana dengan baik dan lancar. Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan diatas menjadikan dasar bagi peneliti untuk melakukan penelitian dengan judul “Kesetaraan Gender Dalam Kepemimpinan Tri Rismaharini Sebagai Wali Kota Surabaya”.

## II. METODE

Penelitian ini menggunakan metode studi literatur dengan pendekatan kualitatif dan analisis deskriptif untuk menjawab masalah penelitian. Metode studi literatur adalah pendekatan yang digunakan untuk mengumpulkan, menganalisis, dan menyintesis literatur atau sumber lain, dengan kata lain peneliti mengumpulkan data pustaka, membaca, mencatat, dan mengolah bahan penelitian. Penelitian ini dimulai dengan pengumpulan data dan identifikasi masalah, selanjutnya, penyaringan data dilakukan untuk digunakan dalam penelitian, kemudian menganalisis artikel yang sudah dilakukan penyaringan data sebelumnya untuk mengumpulkan teori yang mendukung penelitian. Metode ini dipilih dikarenakan fokus penelitian adalah untuk mengkaji, mendeskripsikan, dan menggambarkan Kesetaraan Gender Dalam Kepemimpinan Tri Rismaharini Sebagai Wali Kota Surabaya yang diukur berdasarkan teori kesetaraan gender menurut Suryani (2010) dengan 4 indikator yaitu: 1) Akses, 2) Partisipasi, 3) Kontrol, 4) Manfaat. Pemilihan metode studi literatur untuk penelitian tentang kesetaraan gender dalam kepemimpinan Tri Rismaharini sebagai Wali Kota Surabaya sangat tepat karena memungkinkan peneliti untuk meninjau berbagai sumber yang ada secara komprehensif dan mendalam. Data yang digunakan pada penelitian ini merupakan data sekunder yaitu data yang diperoleh dari media perantara seperti buku, jurnal, maupun dokumen pendukung. Sementara teknik analisis data dilakukan dengan menganalisis isi literatur untuk mengungkap tema utama, perdebatan, dan kesenjangan penelitian terkait topik yang sedang dibahas.

### III. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### A. Akses

Kesetaraan gender dalam kepemimpinan Tri Rismaharini sebagai Wali Kota Surabaya dapat dianalisis melalui empat indikator utama menurut (Suryani, 2010) yaitu akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat. Akses berarti perempuan diberi peluang yang sama untuk memperoleh sumber daya, pelayanan publik, ruang partisipasi, pendidikan, dan penghidupan yang layak. Selama dua periode kepemimpinan Tri Rismaharini, akses perempuan terhadap berbagai bidang kehidupan meningkat secara signifikan. Salah satu bentuk konkret adalah program “Pahlawan Ekonomi” yang diciptakan Risma untuk memberdayakan perempuan, khususnya ibu rumah tangga dan mantan pekerja lokalisasi, agar mampu mandiri secara ekonomi. Program ini membuka akses perempuan terhadap pelatihan keterampilan, modal usaha, pemasaran digital, hingga jejaring bisnis. Program Pahlawan Ekonomi, yang telah didirikan oleh pemerintah kota Surabaya sejak tahun 2010, berfokus pada membantu keluarga menjadi lebih kaya. Program ini dimulai dengan kesadaran bahwa ada keluarga yang masih dianggap miskin meskipun salah satu anggota keluarganya bekerja. Oleh karena itu, program ini bertujuan untuk mendorong peran kedua anggota keluarga, terutama istri atau ibu, dalam menggerakkan ekonomi rumah tangga di Surabaya. Dengan memberdayakan ibu rumah tangga dari keluarga miskin, program tersebut dimaksudkan untuk mengatasi kemiskinan di wilayah Surabaya. Program ini memberikan kesempatan kepada peserta untuk mendirikan UMKM mereka sendiri dengan menyediakan pendampingan dan pelatihan bisnis. Program ini dimulai dengan bimbingan mental, pembuatan produk, dan bimbingan pemasaran produk di bidang kuliner, rumah tangga, dan kreatif. Pemerintah Kota Surabaya berusaha meningkatkan kesejahteraan masyarakat, terutama kelompok rentan seperti UMKM dan perempuan rumah tangga, dan memperkuat ekonomi lokal melalui program-program seperti Program Pahlawan Ekonomi. Program-program Tri Rismaharini berfokus pada pemberdayaan ekonomi dan pengembangan usaha, dan menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan dan kemajuan sosial-ekonomi di Surabaya. Pada tahun 2010, tingkat kemiskinan di Surabaya tercatat lebih dari 20%. Program ini bertujuan untuk melatih ibu rumah tangga agar menjadi pengusaha mandiri, sekaligus pahlawan bagi keluarga mereka. Berawal dari 89 kelompok pada tahun 2010, program ini telah berkembang hingga mencakup lebih dari 11.000 UKM yang dikelola oleh perempuan. Program Pahlawan Ekonomi terbukti berhasil karena di akhir masa jabatan Risma sebagai wali kota, angka kemiskinan di Surabaya turun dari 34 persen menjadi 5,04 persen dengan pertumbuhan ekonomi kota mencapai 7,8 persen pada 2023 (CNN Indonesia, 2024).

Risma juga membuka akses perempuan terhadap pendidikan keterampilan dan bahasa asing melalui pendirian Rumah Bahasa, yang memungkinkan perempuan dari berbagai latar belakang untuk belajar secara gratis. Rumah Bahasa Surabaya merupakan inisiatif layanan publik yang diinisiasi oleh Pemerintah Kota Surabaya dengan tujuan untuk mempersiapkan masyarakat dalam menghadapi persaingan ekonomi dalam konteks Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) 2015. Rumah Bahasa ini diresmikan oleh Wali Kota Tri Rismaharini pada 4 Februari 2014 dan berfungsi sebagai pusat pelatihan bahasa dan komputer gratis yang disediakan oleh Pemerintah Kota Surabaya. Berbagai bahasa diajarkan di Rumah Bahasa Surabaya, termasuk Jepang, Korea, Arab, Mandarin, Thailand, Tagalog, Inggris, Prancis, Jerman, Belanda, Spanyol, dan Rusia. Selain itu, tersedia juga kelas khusus Bahasa Indonesia dan Bahasa Jawa bagi warga asing. Setiap kelas memiliki jumlah peserta yang terbatas untuk memastikan suasana pembelajaran yang kondusif dan efektif. Konsep Rumah Bahasa berbeda dengan kursus bahasa pada umumnya. Dalam program ini, peserta diberikan materi bahasa asing yang praktis dan relevan dengan profesi mereka. Para peserta berlatih dalam kelompok kecil dengan satu tutor, dengan jumlah peserta yang dibatasi guna memastikan pemahaman yang lebih optimal terhadap materi yang diajarkan. Program inovatif ini merupakan salah satu keunggulan Pemerintah Kota Surabaya yang tidak dimiliki oleh kota-kota lain, menunjukkan ide serta konsep yang orisinal. Peserta Rumah Bahasa Surabaya tidak terbatas hanya bagi warga yang memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) Surabaya, tetapi juga terbuka bagi mereka yang berasal dari daerah lain selama mereka bekerja atau bersekolah di Surabaya. Calon peserta diharuskan mendaftar secara langsung ke Rumah Bahasa Surabaya serta membawa dokumen yang diperlukan sesuai dengan mekanisme pendaftaran yang berlaku.

Selain itu, kebijakan pembangunan infrastruktur kota yang ramah gender seperti ruang publik yang aman dan nyaman bagi perempuan dan anak menjadi bukti nyata bahwa akses terhadap ruang kota turut diperhatikan dengan perspektif gender. Pemerintah Kota Surabaya terus berupaya meningkatkan kualitas pelayanan publik yang responsif gender yang terlihat dalam berbagai bidang, seperti pendidikan, kesehatan, penguatan sumber daya manusia, politik, hukum, ekonomi, dan sosial budaya. Oleh sebab itu, pemantauan dan evaluasi pengarusutamaan gender dilakukan secara terus menerus bersama Dinas Pemberdayaan, Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3A-PPKB) dan Badan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan (Bappedalitbang) Kota Surabaya.

#### B. Partisipasi

Partisipasi dalam kesetaraan gender berarti perempuan memiliki peluang untuk terlibat aktif dalam pengambilan keputusan, pembangunan, dan kehidupan sosial-politik. Di bawah kepemimpinan Risma, partisipasi perempuan tidak hanya didorong, tetapi juga dijadikan bagian integral dari perencanaan kota. Risma sendiri merupakan contoh nyata

perempuan yang menembus batas-batas kepemimpinan di ruang publik yang sebelumnya didominasi laki-laki. Kehadirannya sebagai Wali Kota perempuan pertama di Surabaya menjadi inspirasi bagi banyak perempuan untuk percaya diri berkiprah dalam politik dan pemerintahan. Dalam lingkungan birokrasi, Risma dikenal mendorong pengangkatan perempuan pada posisi strategis di lingkungan Pemerintah Kota Surabaya. Hal ini menunjukkan bahwa kepemimpinan Risma menempatkan perempuan bukan hanya sebagai objek pembangunan, melainkan sebagai subjek aktif yang ikut menentukan arah kota.

Kehadiran satu perempuan dalam proses kebijakan dapat sangat membantu memasukkan aspirasi dan perspektif perempuan ke dalam kebijakan yang memungkinkan perubahan menjadi lebih merata dan inklusif. Terdapat tuntutan partisipasi terhadap perempuan dengan beberapa argumen yang kuat seperti, Pertama, argumen keadilan menekankan bahwa monopoli perwakilan oleh kaum laki-laki tidak adil, terutama di negara-negara modern yang mengaku demokratis. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa perempuan dalam masyarakat memiliki hak dan kewajiban yang sama dengan laki-laki. Kedua, argumen pragmatis mengatakan bahwa partisipasi perempuan akan membuat politik lebih konstruktif dan ramah, karena perempuan cenderung membawa pendekatan yang berbeda dalam menyelesaikan masalah. Ketiga, argumen perbedaan menggarisbawahi bahwa perempuan akan membawa gaya dan pendekatan yang berbeda dalam politik, yang dapat memperbaiki dinamika politik secara keseluruhan dan memberikan pengaruh yang signifikan terhadap mereka yang berpartisipasi. Oleh karena itu, peran perempuan sebagai aktor politik akan sangat menguntungkan keberagaman, kesetaraan, dan kesejahteraan masyarakat.

Kerja keras dan dedikasi Tri Rismaharini selama 10 tahun masa jabatannya telah menghasilkan pencapaian yang signifikan. Wanita yang akrab disapa Risma ini telah memenangkan berbagai penghargaan nasional dan internasional. Sejak 2010, Risma telah menerima 322 penghargaan, baik secara pribadi maupun untuk kota. Tak heran jika kantornya dipenuhi dengan piala dan sertifikat penghargaan.

**Tabel 1.** Penghargaan Wali Kota Risma Selama 10 Tahun Menjabat

TAHUN	Penghargaan Nasional (Instansi/Individu)	Penghargaan Internasional (Instansi/Individu)	JUMLAH
2020	13	0	13
2019	40	4	44
2018	17	5	22
2017	50	7	57
2016	15	2	17
2015	19	3	22
2014	29	3	32
2013	32	4	36
2012	46	1	47
2011	19	1	20
2010	12	0	12
<b>JUMLAH</b>	<b>292</b>	<b>30</b>	<b>322</b>

*Sumber: Pemkot Surabaya, 2020*

Berdasarkan tabel diatas, Kepala Humas Pemerintah Kota Surabaya yaitu Febriadhitya Prajataro, merinci bahwa 322 penghargaan tersebut mencakup 12 penghargaan di tahun 2010, 20 penghargaan di tahun 2011, 47 penghargaan di tahun 2012, 36 penghargaan di tahun 2013, 32 penghargaan di tahun 2014, dan 22 penghargaan di tahun 2015. Pada periode kedua jabatannya, Surabaya menerima 17 penghargaan di tahun 2016, 57 penghargaan di tahun 2017, 22 penghargaan di tahun 2018, 44 penghargaan di tahun 2019, dan 13 penghargaan di tahun 2020. Secara keseluruhan, Surabaya telah menerima 30 penghargaan internasional dan 292 penghargaan nasional (Kompas.com, 2020). Namun, tujuan utama pembangunan Surabaya di bawah kepemimpinan Risma bukan hanya untuk mendapatkan penghargaan, melainkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Penghargaan yang diterima sejauh ini menjadi motivasi bagi Risma dan timnya untuk bekerja lebih keras. Ia tetap berkomitmen untuk terus meningkatkan kesejahteraan warga Surabaya hingga akhir masa jabatannya. Pengakuan yang diraih telah membuat Kota Pahlawan semakin dikenal di dunia internasional. Risma berharap dunia dapat melihat keindahan Surabaya sebagai kota wisata kelas dunia.

Tri Rismaharini berperan sebagai aktor utama dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Surabaya selama jabatannya. Melalui program-program inovatifnya, seperti "Kota Peduli Perempuan", Tri Rismaharini telah mendorong perempuan untuk berpartisipasi aktif dalam pembangunan kota, memastikan kesetaraan gender, dan menangani masalah yang secara langsung memengaruhi perempuan. Risma mengatakan bahwa dengan peluncuran program ini, pemerintah kota akan terus membangun dengan cara yang teratur, bersih, nyaman, dan ramah lingkungan, serta peduli dengan perempuan. Menteri Perempuan dan Perlindungan Anak berharap Kota Surabaya akan memiliki ciri khas yang tidak dimiliki kota lain, di mana totalitas dan partisipasi masyarakatnya dapat menumbuhkan semangat kepedulian kepada siapa saja, termasuk perempuan dan anak-anak, serta berupaya untuk meningkatkan kesejahteraan seluruh masyarakat. Pendekatannya yang inklusif telah melibatkan berbagai lapisan masyarakat dalam pengambilan

keputusan, memastikan bahwa aspirasi semua warga, termasuk wanita, didengar dan dipertimbangkan. Selain itu, isu-isu sosial yang mempengaruhi kesejahteraan masyarakat, seperti ketimpangan gender dan kekerasan terhadap perempuan, telah ditangani secara aktif oleh Tri Rismaharini. Tri Rismaharini telah menjadi contoh nyata bagaimana perempuan dapat memainkan peran penting dalam politik lokal untuk mencapai tujuan pembangunan dan kesetaraan melalui tindakan konkretnya untuk menciptakan lingkungan yang ramah gender dan meningkatkan kesejahteraan semua warga.

Selama jabatan Tri Rismaharini, ia mampu merepresentasikan dirinya sebagai seorang yang substantif, dimana berarti mengakui dan memasukkan kepentingan perempuan dalam proses pengambilan keputusan. Hal ini termasuk memastikan bahwa kebutuhan, aspirasi, dan perspektif perempuan diwakili secara adil dan dimasukkan ke dalam program dan kebijakan pemerintah. Tri Rismaharini menekankan betapa pentingnya inklusi dan kesetaraan gender dalam berbagai kebijakan, mulai dari kesehatan hingga ekonomi, serta dalam menangani masalah sosial yang melibatkan perempuan. Selama kepemimpinannya, Tri Rismaharini berusaha untuk memastikan bahwa suara perempuan didengar dan dipertimbangkan dalam proses pengambilan keputusan di tingkat lokal, sehingga mereka dapat lebih terlibat dalam pembangunan kota. Dengan menggunakan representasi substantif ini, kebijakan yang lebih memperhatikan gender dapat dibuat dan akan berdampak positif pada pemberdayaan perempuan dan kesetaraan gender secara keseluruhan.

### C. Kontrol

Kontrol dalam konteks kesetaraan gender berarti kemampuan perempuan untuk menentukan keputusan atas hidupnya, termasuk dalam hal ekonomi, sosial, dan politik. Kepemimpinan Risma menciptakan sistem yang memungkinkan perempuan memiliki kontrol lebih besar atas sumber daya dan arah kehidupannya. Dalam program penutupan lokalisasi Dolly misalnya. Kawasan Gang Dolly di Surabaya, di wilayah Dukuh Kupang, terkenal sebagai pusat prostitusi terbesar di Asia Tenggara. Selain berfungsi sebagai pusat prostitusi, Gang Dolly juga mempekerjakan beberapa tukang parkir, perantara prostitusi, dan pedagang kaki lima. Hal ini menyebabkan keduanya berinteraksi satu sama lain dalam simbiosis yang saling menguntungkan. Seorang PSK memberi tarif untuk layanan kencan berkisar antara 100.000 dan 150.000 untuk setiap sesi singkat yang berlangsung antara satu dan dua jam. Ia dapat menampung antara lima dan sepuluh pelanggan dalam satu malam. Kemudian, ia membagikan pendapatannya kepada germo dan calo yang telah memfasilitasi kedatangan para pengunjung.

Penutupan lokalisasi Dolly di Surabaya adalah upaya untuk membuat kota lebih aman dan beradab. Hal ini juga dilakukan untuk mengantisipasi tantangan internal dan eksternal. Dasar hukum yang kuat membantu penutupan ini, seperti undang-undang tentang penghapusan diskriminasi terhadap perempuan, pemberantasan perdagangan orang, hak asasi manusia, kesejahteraan sosial, dan perlindungan anak. Selain itu, peraturan daerah tentang penyelenggaraan perlindungan anak, kesejahteraan sosial, dan larangan penggunaan bangunan untuk kegiatan asusila juga membantu menangani masalah ini. Dengan menggunakan kerangka hukum yang ada, pemerintah kota berusaha untuk menangani dan bertanggung jawab atas masalah sosial yang terkait dengan wilayah tersebut sambil melindungi hak dan kesejahteraan masyarakat yang terdampak.

Pentingnya penutupan kawasan lokalisasi oleh pemimpin daerah tidak dapat diabaikan. Yang menarik, alih-alih menggunakan pendekatan koersif, Wali Kota Risma menerapkan pendekatan desain berbasis kemanusiaan (*human-centered design*). Konsep ini mengutamakan pemahaman serta kenyamanan manusia sebagai fokus utama dalam mencapai tujuan tertentu. Dalam kasus lokalisasi Dolly, salah satu kawasan prostitusi terbesar di Asia Tenggara, pendekatan yang mengandalkan kekerasan hanya akan memperpanjang konflik. Namun, melalui pendekatan yang lebih humanis, Risma berhasil mengubah kawasan Dolly menjadi pusat ekonomi berbasis usaha kecil dan menengah (UKM) yang berkembang pesat. Wali Kota Risma menjelaskan bahwa dalam menangani perdagangan manusia, diperlukan identifikasi akar masalah. Temuan menunjukkan bahwa penutupan semua kawasan prostitusi di enam lokasi di Surabaya menjadi suatu keharusan. Hampir setiap bulan, beliau harus bekerja sama dengan pihak kepolisian untuk menangani kasus perdagangan manusia yang melibatkan perempuan dan anak-anak. Sejak tahun 2012, penutupan kawasan lokalisasi dilakukan secara bertahap. Selain menangani penutupan lokalisasi, sebagai wali kota perempuan pertama di Surabaya, Risma juga harus memberikan solusi bagi para pihak yang terdampak, termasuk pekerja seks komersial, muncikari, penyanyi karaoke, serta petugas parkir. Sebagai Presiden United Cities and Local Government (UCLG) Asia Pacific, beliau memastikan bahwa keenam bekas kawasan prostitusi tersebut dialihfungsikan menjadi pusat industri kreatif dengan berbagai bisnis lokal yang berkembang pesat, termasuk produksi batik dan kuliner.

Risma tidak hanya menghentikan praktik prostitusi, tetapi memberikan jalan bagi para mantan pekerja seks komersial untuk memiliki kontrol ekonomi melalui pelatihan dan pembentukan usaha mandiri. Para perempuan ini diajari keterampilan produksi (seperti batik, makanan, dan kerajinan), pengemasan, serta pemasaran produk, sehingga mereka bisa memilih jalur hidup baru dengan kemandirian. Melalui gaya kepemimpinan yang transformasional dan langsung turun ke lapangan, Risma menunjukkan bahwa perempuan tidak hanya mampu mengambil alih kontrol atas kebijakan publik, tetapi juga menginspirasi perempuan lain untuk melakukan hal yang sama. Secara simbolik dan



praktis, ia memperluas ruang kontrol perempuan atas keputusan strategis kota, membuktikan bahwa perempuan bisa memegang otoritas dalam ranah publik secara efektif dan bermartabat.

#### **D. Manfaat**

Manfaat adalah sebuah keuntungan yang bisa didapatkan dari suatu tindakan, barang, layanan, atau pengalaman. Dalam kepemimpinan Tri Rismaharini, terdapat beberapa manfaat yang dapat dirasakan oleh masyarakat Kota Surabaya. Misalnya seperti di bidang ekonomi, program pemberdayaan perempuan telah meningkatkan kesejahteraan keluarga dengan membuka peluang usaha baru bagi ibu rumah tangga dan perempuan pekerja. Di sektor sosial, kebijakan pembangunan ruang terbuka hijau dan taman kota memberikan manfaat bagi perempuan dalam menciptakan lingkungan yang lebih sehat dan nyaman. Sementara itu, dalam bidang pendidikan dan keterampilan, program seperti Rumah Bahasa dan pelatihan kewirausahaan memberikan manfaat jangka panjang bagi perempuan untuk meningkatkan kapasitas dan kemandirian mereka. Dengan berbagai manfaat yang dihasilkan dari kepemimpinannya, Risma membuktikan bahwa kesetaraan gender dalam kepemimpinan bukan hanya tentang memberikan kesempatan yang sama, tetapi juga tentang menciptakan dampak positif yang berkelanjutan bagi masyarakat. Secara keseluruhan, kepemimpinan Tri Rismaharini menjadi bukti bahwa perempuan dapat berperan sebagai pemimpin yang efektif dan transformatif. Dengan memberikan akses yang luas, mendorong partisipasi, meningkatkan kontrol, serta mendistribusikan manfaat secara adil, ia telah membangun Surabaya sebagai kota yang lebih inklusif dan berkeadilan gender. Keberhasilannya dalam menciptakan kebijakan yang berpihak pada perempuan menjadi inspirasi bagi pemimpin perempuan di Indonesia untuk terus berkontribusi dalam pembangunan yang lebih adil dan setara.

Meskipun Surabaya tidak memiliki sumber daya alam atau keindahan alam seperti kota lain, Risma ingin membangun Surabaya sejajar dengan kota-kota maju di dunia. Dia langsung pergi ke lapangan untuk mengawasi pemugaran beberapa taman di Surabaya. Di antaranya adalah Taman Persahabatan, Taman Skate dan BMX, Taman Flora, Taman Undaan, Taman Bundaran Dolog, Taman Bawean, dan Taman Bungkul di Jalan Raya Darmo, yang dirancang sebagai taman rekreasi multifungsi. Di sepanjang jalan Basuki Rahmat, yang akan melanjutkan ke jalan Tunjungan, Blauran, dan Panglima Sudirman, Risma juga membangun jalur pedesaan modern. Orang-orang sekarang dapat menikmati waktu luang mereka di taman dan jalur pedestrian yang nyaman. Dia juga ingin Surabaya bebas dari sampah. Dengan kinerja yang luar biasa ini, Kota Surabaya menerima piala adipura untuk kategori kota metropolitan pada tahun 2011, 2012, dan 2013. Selama tiga tahun kepemimpinan Risma, Surabaya tidak hanya menerima adipura, tetapi juga dianggap sebagai kota dengan partisipasi lingkungan terbaik se-Asia Pasifik pada tahun 2012 oleh Citynet. Ini adalah hasil dari keberhasilan pemerintah kota dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan lingkungan. Selain itu, pada bulan Oktober 2013, Kota Surabaya menerima penghargaan Future Government Awards 2013 dari 800 kota di seluruh Asia-Pasifik untuk dua topik berbeda: pusat data dan inklusi digital.

Sebagai seorang pemimpin reformatif, Tri Rismaharini telah mengubah Surabaya menjadi kota yang hijau, asri, dan bersih. Ia telah meningkatkan kinerja karyawan, mengurangi praktik birokrasi, dan menerapkan sistem e-government. Selain itu, Surabaya selalu memiliki prestasi. Standar kepemimpinan telah muncul selama sepuluh tahun Surabaya dipimpin Bu Risma. Seorang wali kota Surabaya yang akan datang tidak hanya harus memiliki kemampuan untuk mengembangkan ide-ide pembangunan besar bahkan lebih dari itu. Pemimpin yang rajin melakukan pekerjaan, bahkan turun ke lapangan secara aktif. Risma tidak hanya dapat memahami setiap detail dalam persoalan, tetapi ia juga mampu mengurainya. Ia juga seorang pemimpin yang setia terhadap kesulitan warganya, mampu memberikan solusi praktis yang dirasakan oleh masyarakat, menjadi inspirasi bagi orang lain, memotivasi penduduknya, serta jalan hidupnya menjadi contoh bagi masyarakat.

Risma menyatakan bahwa ia belajar dari rakyatnya selama pengabdianya sebagai walikota. Ia selalu mencari keinginan dan kebutuhan warganya dan berusaha untuk menemukan ide-ide baru untuk kebijakannya. Risma dapat blusukan secara langsung untuk melihat PSK, anak-anak jalanan dan terlantar, kondisi fasilitas umum, dan sekaligus menemukan solusinya. Orang Surabaya dan orang Indonesia sangat mengagumi Risma, bahkan ia dinobatkan sebagai wali kota terbaik dunia oleh The City Mayors Foundation pada bulan Februari 2014. Tri Rismaharini terpilih sebagai wali kota Surabaya karena dianggap berhasil untuk membawa perubahan besar pada kemajuan kota.

## **IV. SIMPULAN**

Berdasarkan hasil dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa kepemimpinan Tri Rismaharini sebagai Wali Kota Surabaya secara signifikan telah mewujudkan kesetaraan gender melalui penerapan empat indikator utama. Pertama, dari segi akses, Risma berhasil membuka peluang yang setara bagi perempuan melalui program-program inovatif seperti Pahlawan Ekonomi dan Rumah Bahasa, Risma membuka akses yang luas bagi perempuan untuk memperoleh pendidikan, keterampilan, serta peluang ekonomi yang mendukung kemandirian mereka. Upaya ini diperkuat dengan kebijakan pembangunan infrastruktur kota yang ramah gender, menjadikan perempuan lebih terjamin dalam memperoleh ruang publik yang aman dan inklusif. Kedua, dalam hal partisipasi, Risma juga mendorong partisipasi aktif perempuan dalam pembangunan dan pemerintahan. Kehadirannya sebagai wali kota perempuan pertama Surabaya menjadi inspirasi yang membuka jalan bagi perempuan untuk berani tampil dalam ranah publik, sekaligus



memperjuangkan aspirasi mereka melalui kebijakan yang inklusif dan responsif gender. Ketiga, pada indikator kontrol, Risma memberikan ruang bagi perempuan untuk memiliki kendali atas kehidupan dan masa depannya, melalui kebijakan humanis seperti penutupan lokalisasi Dolly yang disertai program pemberdayaan ekonomi, Risma memastikan perempuan memiliki kontrol lebih besar atas hidup dan masa depannya, sehingga mampu lepas dari lingkaran ketidakberdayaan sosial maupun ekonomi. Keempat, dalam indikator manfaat, dari kepemimpinan Risma dirasakan luas oleh masyarakat Surabaya, baik di bidang ekonomi, sosial, pendidikan, maupun lingkungan. Angka kemiskinan yang menurun drastis, pertumbuhan UMKM perempuan, hadirnya ruang publik yang sehat, hingga penghargaan nasional dan internasional yang diterima Surabaya menjadi bukti nyata bahwa kesetaraan gender membawa dampak positif berkelanjutan bagi masyarakat. Secara keseluruhan, kepemimpinan Tri Rismaharini di Surabaya merupakan contoh sukses dari implementasi kesetaraan gender dalam tata kelola pemerintahan, keberhasilan Risma membuktikan bahwa kesetaraan gender dapat diwujudkan dan menghasilkan dampak positif yang nyata. Berbagai inovasi serta transformasi kota yang telah dicapainya tidak hanya membawa manfaat besar bagi masyarakat Surabaya, tetapi juga menjadi inspirasi bagi pemimpin perempuan lainnya di Indonesia.

### UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur kepada Allah SWT atas limpahan rahmat dan berkah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir yang berjudul “Kesetaraan Gender Dalam Kepemimpinan Tri Rismaharini Sebagai Wali Kota Surabaya” dengan baik. Penulis juga memahami bahwa jurnal ini masih jauh dari kesempurnaan, tetapi besar harapan bahwa isi dari jurnal ini dapat memberikan manfaat bagi semua orang. Ucapan terima kasih juga tak luput disampaikan oleh penulis kepada seluruh anggota keluarga tercinta yaitu Alm. Bpk. M. Achsan, Ibu Susanti Asrifah, Saudari Adinda Rahmaniansyah Achsanti, Uti Nurcholis, Tante Nunuk Mardiana, Serta saudara Khalif dan Hamiz yang telah senantiasa memberikan do’a, dukungan dan semangat selama ini, kemudian ucapan terima kasih juga disampaikan oleh penulis kepada seluruh teman-teman yang tidak dapat disebutkan satu persatu, dimana mereka semua telah memberikan semangat kepada penulis.

### REFERENSI

- [1] I. Baiduri, N. Hasanah, F. Maulana, and M. I. Anshori, “Gender dan Kepemimpinan : Sebuah Kajian Literatur,” *J. JIMEK*, vol. 3, no. 2, pp. 179-204, 2023.
- [2] G. Burnama, N. Krisdinanto, and D. Yoanita, “STEREOTYPING RISMA: PEMBINGKAIAN SOSOK TRI RISMAHARINI DI MAJALAH DETIK DAN TEMPO,” *J. Scriptura*, vol. 4, no. 1, pp. 1-9, 2014.
- [3] M. A. Fachrudin, “INOVASI KEPEMIMPINAN KEPALA DAERAH (Studi Kasus Walikota Surabaya Ir.Tri Rismaharini,MT),” pp. 1-13, 2017.
- [4] M. F. Fasya, L. Karwati, and W. Herwina, “PERAN GENDER PADA LEMBAGA KURSUS DAN PELATIHAN DI KOTA TASIKMALAYA,” *J. Cendekiawan Ilmiah PLS*, vol. 7, no. 2, pp. 138-144, 2022.
- [5] F. Hadi and O. Amanaturrosyidah, “Survei SMRC: 97% Warga Surabaya Puas dengan Kinerja Risma,” *Kumparan.com*, Nov. 22, 2020. [Online]. Available: <https://kumparan.com> [Accessed May. 1, 2024].
- [6] A. Hakim and B. Santoso, “Risma Paparkan Keberhasilannya Menutup Eks Lokalisasi Dolly Surabaya,” *ANTARA*, Dec. 12, 2019. [Online]. Available: <https://www.antaranews.com> [Accessed May. 1, 2024].
- [7] F. E. Kartika and Muarifuddin, “Analisis Kesetaraan Gender Dalam Kepemimpinan Organisasi Mahasiswa,” *J. Pendidikan dan Konseling*, vol. 5, no. 2, pp. 2441-2455, 2023.
- [8] I. S. Maharani, A. Nugraha, and R. K. Pratama, “Optimalisasi Peran Kepemimpinan Perempuan Dalam Membangun Kesetaraan Gender,” *J. Pengabdian kepada Masyarakat Nusantara (JPkMN)*, vol. 5, no. 3, pp. 3042-3048, 2024.
- [9] L. Malihah, H. Zabidi, N. Atkia, N. N. Apifah, and P. Haryanti, “Kepemimpinan Perempuan dan Kesetaraan Gender: Sebuah Tinjauan,” *J. Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, vol. 24, no. 2, pp. 1094-1103, 2024.
- [10] Pemerintah Kota Surabaya, “10 TAHUN KEPEMIMPINAN WALI KOTA RISMA, TEKAN POLUSI DAN TURUNKAN SUHU DENGAN MEMBANGUN 573 TAMAN,” *Surabaya.go.id*, Dec. 10, 2020. [Online]. Available: <https://surabaya.go.id> [Accessed May. 1, 2024].
- [11] Pemerintah Surabaya, “Raih 322 Penghargaan, Bukti Kepemimpinan Wali Kota Risma Diakui Dunia,” *Kompas.com*, Dec. 4, 2020. [Online]. Available: <https://biz.kompas.com> [Accessed May. 1, 2024].
- [12] N. Permatasari, “Mengupas Tuntas Bentuk Kepemimpinan Seorang Tri Rismaharini yang Menginspirasi,” *Kumparan.com*, Dec. 22, 2022. [Online]. Available: <https://kumparan.com> [Accessed May. 1, 2024].
- [13] Pewarta, “Menelisik Sosok Tri Rismaharini sebagai Pemimpin Perempuan Indonesia,” *SUARA INDONESIA*, Dec. 20, 2021. [Online]. Available: <https://suaraindonesia.co.id> [Accessed May. 1, 2024].
- [14] M. R. Pratama and Fitriyah, “Kepemimpinan Tri Rismaharini dalam Mengatasi Pengelolaan Sampah di Kota Surabaya,” *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, vol. 4, no. 1, pp. 191-189, 2021.

- [15] P. A. Rahmi, "Kepemimpinan Kepala Daerah (Studi Kasus Walikota Surabaya, Tri Rismaharini dalam Perspektif Emotional Intelligence)," *J. Kebijakan dan Manajemen Publik*, vol. 3, no. 2, pp. 112-121, 2015.
- [16] J. G. Rizal and J. Akbar, "Ditunjuk Jadi Menteri Sosial, Ini Sejumlah Prestasi Tri Rismaharini," Kompas.com, Dec. 22, 2020. [Online]. Available: <https://www.kompas.com> [Accessed May. 1, 2024].
- [17] F. A. Salma, "GAYA KEPEMIMPINAN TRI RISMAHARINI SEBAGAI WALIKOTA SURABAYA," pp. 1-15, 2022.
- [18] E. S. Siregar and Y. Wardi, "PENGARUH GENDER DAN GAYA KEPEMIMPINAN TERHADAP KINERJA ORGANISASI," *J. Education and development Institut Pendidikan Tapanuli Selatan*, vol.11, no.3, pp. 223-229, 2023.
- [19] A. Tjahjono, "Risma Ungkap Strategi Keberhasilan Membangun Surabaya," RMOLJATIM, Aug. 29, 2020. [Online]. Available: <https://www.rmoljatim.id> [Accessed May. 1, 2024].
- [20] R. W. Tuti and S. E. Adawiyah, "KEPEMIMPINAN WALIKOTA SURABAYA TRI RISMAHARINI SEBAGAI MODEL BIROKRASI EFEKTIF," *J. Ilmu Komunikasi Politik dan Komunikasi Bisnis*, vol. 4, no. 1, pp. 73-82, 2020.
- [21] R. Indrawan, "Ini Alasan Kenapa Risma Dicintai Rakyat Surabaya," Portal Indonesia News, Aug. 31, 2014. [Online]. Available: <https://www.portalindonesianews.com>. [Accessed May. 10, 2024].
- [22] H. Selfia, "Kepemimpinan Wanita ala Wali Kota Risma," Kompasiana.com, Nov. 14, 2019. [Online]. Available: <https://www.kompasiana.com>. [Accessed May. 10, 2024].
- [23] C. H. Noer, "Pemkot Surabaya Luncurkan Kota Peduli Perempuan," Antaranews.com, Jan. 18, 2012. [Online]. Available: <https://jatim.antaranews.com>. [Accessed May. 10, 2024].
- [24] DP3APPKB Surabaya, "SURABAYA KOTA RESPONSIF GENDER," DP3APPKB, Nov. 17, 2023. [Online]. Available: <https://dp3appkb.surabaya.go.id>. [Accessed May. 10, 2024].
- [25] J. M. B. Ubaedi, S. Huroidhoh, S. A. Optafiyacha and A. Ummah, "Perempuan di Eksekutif: Representasi Tri Rismaharini Sebagai Walikota Surabaya Periode 2010-2020," *J. Politik dan Pemerintahan Daerah*, vol. 6, no. 1, pp. 1-10, 2024.

**Conflict of Interest Statement:**

*The author declares that the research was conducted in the absence of any commercial or financial relationships that could be construed as a potential conflict of interest.*